



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)**

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat	: Ke - 22 (Duapuluh dua)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Hari, tanggal	: Rabu, 1 Juli 2020
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 16.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	: Melanjutkan Rapat Dengar Pendapat tanggal 29 Juni 2020; 1. Strategi pengembangan program PT Pertamina (Persero) RDMP 2. Rencana program PT Pertamina (Persero) dalam meningkatkan penggunaan BBM ramah lingkungan 3. Penjelasan proses kegiatan pengadaan minyak bumi melalui ISC 4. Penerimaan negara sebelum dan sesudah Petral dibubarkan 5. Penyampaian progres kegiatan digitalisasi SPBU Triwulan kedua 6. Lain-lain
Ketua Rapat	: H. Alex Noerdin (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Golkar)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 30 Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari: 15 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 15 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 21 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, 1 Juli 2020 dibuka pukul 13.00 WIB, dipimpin oleh H. Alex Noerdin, selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara: Melanjutkan Rapat Dengar Pendapat tanggal 29 Juni 2020
 - a. Strategi pengembangan program PT Pertamina (Persero) RDMP
 - b. Rencana program PT Pertamina (Persero) dalam meningkatkan penggunaan BBM ramah lingkungan
 - c. Penjelasan proses kegiatan pengadaan minyak bumi melalui ISC
 - d. Penerimaan negara sebelum dan sesudah Petral dibubarkan
 - e. Penyampaian progres kegiatan digitalisasi SPBU Triwulan kedua
 - f. Lain-lain
3. Ketua Rapat menyampaikan pemaparan terkait agenda rapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) antara lain:
 - a. Restrukturisasi organisasi dan pembentukan subholding migas di PT Pertamina (Persero) masih memerlukan perencanaan yang matang dan kajian dasar hukum yang mendalam dalam menjaga ketahanan energi Nasional. Selain itu rencana PT Pertamina akan meningkatkan penggunaan BBM yang ramah lingkungan dapat diartikan bahwa PT Pertamina akan mereduksi pengadaan BBM RON 88 yang notabene kurang ramah lingkungan.
 - b. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) juga perlu menjelaskan secara jelas dan transparan proses kegiatan pengadaan BBM yang berasal dari luar negeri melalui *Integrated Supply Chain*. Hal ini penting mengingat pada tahun 2019 terjadi defisit transaksi berjalan dimana sektor energi merupakan penyumbang terbesar defisit tersebut. Karena itu, pada kesempatan ini perlu dijelaskan peran dan tanggung jawab kelembagaan *Integrated Supply Chain* (ISC) mengingat pembentukan ISC terjadi setelah dilikuidasinya Petral Trading Ltd.

C. Isu penting lainnya yang selama ini berkembang adalah progress kegiatan Digitalisasi SPBU hingga Triwulan kedua tahun 2020.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk dapat menyampaikan detail progress dan skema pembiayaan seluruh Megaprojek Kilang Minyak dan Petrokimia dan disampaikan tertulis secara berkala dan transparan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam mencari mitra kerja baru yang lebih baik untuk mendukung seluruh Megaprojek Kilang Minyak dan Petrokimia demi Ketahanan Energi Nasional.
3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk melanjutkan Rapat Dengar Pendapat pada Masa Persidangan selanjutnya untuk membahas agenda lainnya yaitu Program BBM Ramah Lingkungan, Proses kegiatan pengadaan minyak melalui *ISC*, Update Petral dan Progress Digitalisasi SPBU.
4. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menyusun roadmap pengembangan mini *refinery* dan melanjutkan pembangunan mini depot untuk wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
5. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 6 Juli 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 16.30 WIB

**DIREKTUR UTAMA
PT PERTAMINA (PERSERO)**

Jakarta, 1 Juli 2020
KETUA RAPAT,

NICKE WIDYAWATI

H. ALEX NOERDIN
A-278